



**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Minahasa Selatan telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 492 Tahun 2018 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

Dengan...

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.019.742.548.153,-
2. Belanja Daerah	Rp.	1.059.591.398.153,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(39.848.850.000,-)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	40.348.850.000,-
b. Pengeluaran	Rp.	500.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp.	39.848.850.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	---

P a s a l 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 60.558.692.000,-
 - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 763.078.387.000,-
 - Lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp. 196.105.469.153,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.885.618.729,-
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.906.822.665,-

c.Hasil...

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 419.476.909,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 40.346.773.697,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 18.223.500.000,-
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 542.893.540.000,-
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 201.961.347.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 18.156.600.000,-
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. ---
 - c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 31.059.126.153,-
 - d. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 146.889.743.000,-
 - e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. ---

P a s a l 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 626.962.973.522,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 432.628.424.631,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 413.974.524.382,-
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 10.304.000.000,-
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.300.000.000,-
 - d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.979.244.140,-
 - e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 195.405.205.000,-
 - f. Belanja Bunga sejumlah Rp. ---
 - g. Belanja Subsidi sejumlah Rp. ---
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

(3)Belanja...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 19.915.591.779,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 230.091.356.432,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 182.621.476.420,-

P a s a l 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 40.348.850.000,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 40.348.850.000,-
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ---
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. ---
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. ---
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. ---
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. ---

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. ---
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 500.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. ---
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. ---

P a s a l 5

Untuk lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

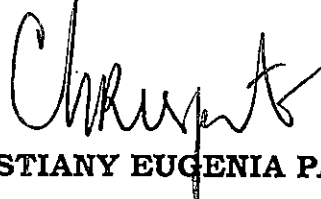
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 28 Desember 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DENNY P. KAAWOAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI
UTARA : NOMOR 5 TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.019.742.548.153,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.558.692.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.885.618.729,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.906.822.665,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	419.476.909,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.346.773.697,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	763.078.387.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.223.500.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	542.893.540.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	201.961.347.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	196.105.469.153,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.156.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.059.126.153,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.889.743.000,00
2	BELANJA	1.059.591.398.153,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	626.962.973.522,00
2.1.1	Belanja Pegawai	413.974.524.382,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.304.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.300.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.979.244.140,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	195.405.205.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	432.628.424.631,00
2.2.1	Belanja Pegawai	19.915.591.779,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.091.356.432,00
2.2.3	Belanja Modal	182.621.476.420,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.848.850.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.348.850.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.348.850.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.848.850.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Amurang, 28 December 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	17.866.946.910,00	265.319.073.444,00	254.347.904.135,00	519.666.977.579,00
1.01	Pendidikan	0,00	208.894.980.994,00	65.756.195.190,00	274.651.176.184,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	208.894.980.994,00	65.724.945.190,00	274.619.926.184,00
1.01 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00
1.02	Kesehatan	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.154.234.745,00	132.606.165.111,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.150.234.745,00	132.602.165.111,00
1.02 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	50.000.000,00	4.995.126.835,00	9.576.728.000,00	14.571.854.835,00
1.05 . 1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.126.256.859,00	5.100.000.000,00	7.226.256.859,00
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50.000.000,00	2.868.869.976,00	4.303.678.000,00	7.172.547.976,00
1.05 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
1.06	Sosial	0,00	4.055.300.561,00	17.449.550.000,00	21.504.850.561,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.056.647.398,00	2.600.700.000,00	4.657.347.398,00
1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.998.653.163,00	14.848.850.000,00	16.847.503.163,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	330.000.000,00	23.861.091.323,00	26.660.458.280,00	50.521.549.603,00
2.01	Tenaga Kerja	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
2.03	Pangan	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.08 . 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.09	Perhubungan	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	1.542.429.177,00	8.368.000.000,00	9.910.429.177,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.542.429.177,00	8.288.000.000,00	9.830.429.177,00
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.455.370.735,00	754.390.000,00	2.209.760.735,00
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0,00	1.455.370.735,00	704.390.000,00	2.159.760.735,00
2.11 . 3.02.01	DINAS-PARIWISATA	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12	Penanaman Modal	0,00	1.781.220.527,00	1.229.500.000,00	3.010.720.527,00
2.12 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.781.220.527,00	1.000.000.000,00	2.781.220.527,00
2.12 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	947.500.000,00	947.500.000,00
2.13 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	945.000.000,00	945.000.000,00
2.13 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.17	Perpustakaan	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	135.010.000,00	135.010.000,00
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	135.010.000,00	135.010.000,00
3	Urusan Pilihan	456.000.000,00	18.446.255.812,00	44.832.996.000,00	63.279.251.812,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.02	Pariwisata	10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.633.233.000,00	13.056.860.002,00
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.633.233.000,00	13.056.860.002,00
3.03	Pertanian	0,00	10.887.201.856,00	25.860.148.000,00	36.747.349.856,00
3.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN	0,00	0,00	84.650.000,00	84.650.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	0,00	10.887.201.856,00	25.735.498.000,00	36.622.699.856,00
3.03 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.06	Perdagangan	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.768.275.000,00	8.111.138.384,00
3.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.08	Transmigrasi	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.001.089.601.243,00	319.336.552.943,00	106.787.066.216,00	426.123.619.159,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	0,00	68.120.125.392,00	76.473.593.365,00	144.593.718.757,00
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	14.828.709.279,00	0,00	14.828.709.279,00
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	563.582.414,00	0,00	563.582.414,00
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	14.453.883.184,00	45.407.173.365,00	59.861.056.549,00
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	4.628.434.906,00	18.944.420.000,00	23.572.854.906,00
4.01 . 4.01.05	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	1.490.548.521,00	147.000.000,00	1.637.548.521,00
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	1.608.117.561,00	147.000.000,00	1.755.117.561,00
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	1.610.024.596,00	147.000.000,00	1.757.024.596,00
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN MODOINDING	0,00	1.648.431.875,00	177.000.000,00	1.825.431.875,00
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN TOMPASOBARU	0,00	2.113.136.085,00	147.000.000,00	2.260.136.085,00
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MAESAAN	0,00	1.930.861.026,00	147.000.000,00	2.077.861.026,00
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	1.896.334.127,00	147.000.000,00	2.043.334.127,00
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN MOTOLING	0,00	1.678.923.375,00	147.000.000,00	1.825.923.375,00
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	1.596.623.223,00	147.000.000,00	1.743.623.223,00
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	1.732.514.829,00	147.000.000,00	1.879.514.829,00
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TENGA	0,00	2.125.285.605,00	147.000.000,00	2.272.285.605,00
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN AMURANG	0,00	4.190.444.057,00	5.798.339.623,00	9.988.783.680,00
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	2.786.702.990,00	2.098.962.264,00	4.885.665.254,00
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	2.108.937.734,00	2.136.698.113,00	4.245.635.847,00
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	1.431.967.805,00	147.000.000,00	1.578.967.805,00
4.01 . 4.01.20	KECAMATAN TATAPAAAN	0,00	1.711.260.450,00	147.000.000,00	1.858.260.450,00
4.01 . 4.01.21	KECAMATAN TARERAN	0,00	1.985.401.750,00	147.000.000,00	2.132.401.750,00
4.02	Pengawasan	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.03	Perencanaan	0,00	4.491.493.229,00	5.775.393.335,00	10.266.886.564,00
4.03 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.098.111.135,00	1.098.111.135,00
4.03 . 4.01.05	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.06	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.07	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.08	KECAMATAN MODOINDING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.09	KECAMATAN TOMPASO BARU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.10	KECAMATAN MAESAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.11	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.12	KECAMATAN MOTOLING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.13	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.14	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.15	KECAMATAN TENGA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.17	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.18	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.19	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.20	KECAMATAN TATA PAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.21	KECAMATAN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	4.491.493.229,00	4.629.282.200,00	9.120.775.429,00
4.04	Keuangan	1.001.089.601.243,00	237.064.197.583,00	16.002.909.240,00	253.067.106.823,00
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	959.183.856.153,00	231.430.849.341,00	9.333.434.800,00	240.764.284.141,00
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	41.905.745.090,00	5.633.348.242,00	6.669.474.440,00	12.302.822.682,00
4.05	Kepegawaian	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
JUMLAH		1.019.742.548.153,00	626.962.973.522,00	432.628.424.631,00	1.059.591.398.153,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.848.850.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
4.04	Keuangan	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Amurang, 28 December 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	208.894.980.994,00	66.669.945.190,00	275.564.926.184,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	208.894.980.994,00	65.724.945.190,00	274.619.926.184,00
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	945.000.000,00	945.000.000,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.150.234.745,00	132.602.165.111,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.150.234.745,00	132.602.165.111,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.956.696.200,00	74.423.317.094,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.126.256.859,00	5.100.000.000,00	7.226.256.859,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.126.256.859,00	5.100.000.000,00	7.226.256.859,00
1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50.000.000,00	2.868.869.976,00	4.303.678.000,00	7.172.547.976,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	50.000.000,00	2.868.869.976,00	4.303.678.000,00	7.172.547.976,00
1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.056.647.398,00	2.643.750.000,00	4.700.397.398,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	2.056.647.398,00	2.600.700.000,00	4.657.347.398,00
3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.998.653.163,00	14.848.850.000,00	16.847.503.163,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	1.998.653.163,00	14.848.850.000,00	16.847.503.163,00
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	1.557.060.494,00	479.100.000,00	2.036.160.494,00
2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
3.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.03.01	DINAS PANGAN	0,00	1.799.311.574,00	350.000.000,00	2.149.311.574,00


KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	84.650.000,00	84.650.000,00
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.542.429.177,00	8.288.000.000,00	9.830.429.177,00
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	1.542.429.177,00	8.288.000.000,00	9.830.429.177,00
2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0,00	1.455.370.735,00	704.390.000,00	2.159.760.735,00
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.455.370.735,00	704.390.000,00	2.159.760.735,00
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.781.220.527,00	1.000.000.000,00	2.781.220.527,00
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	0,00	1.781.220.527,00	1.000.000.000,00	2.781.220.527,00
2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	1.734.018.428,00	500.000.000,00	2.234.018.428,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00
2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00
2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	135.010.000,00	135.010.000,00
3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.02.01	DINAS PARIWISATA	10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.683.233.000,00	13.106.860.002,00
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.633.233.000,00	13.056.860.002,00
3.03.01	DINAS PERTANIAN	0,00	10.887.201.856,00	25.735.498.000,00	36.622.699.856,00
3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	10.887.201.856,00	25.735.498.000,00	36.622.699.856,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	14.828.709.279,00	0,00	14.828.709.279,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	14.828.709.279,00	0,00	14.828.709.279,00
4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	563.582.414,00	0,00	563.582.414,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	563.582.414,00	0,00	563.582.414,00
4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	14.453.883.184,00	46.868.784.500,00	61.322.667.684,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.03	Urusan Pilihan Pertanian	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	14.453.883.184,00	45.407.173.365,00	59.861.056.549,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	1.098.111.135,00	1.098.111.135,00
4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	4.628.434.906,00	18.944.420.000,00	23.572.854.906,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	4.628.434.906,00	18.944.420.000,00	23.572.854.906,00
4.01.05	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	1.490.548.521,00	150.000.000,00	1.640.548.521,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.490.548.521,00	147.000.000,00	1.637.548.521,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.06	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	1.608.117.561,00	150.000.000,00	1.758.117.561,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.608.117.561,00	147.000.000,00	1.755.117.561,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.07	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	1.610.024.596,00	150.000.000,00	1.760.024.596,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.610.024.596,00	147.000.000,00	1.757.024.596,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.08	KECAMATAN MODOINDING	0,00	1.648.431.875,00	180.000.000,00	1.828.431.875,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.648.431.875,00	177.000.000,00	1.825.431.875,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.09	KECAMATAN TOMPASOBARU	0,00	2.113.136.085,00	150.000.000,00	2.263.136.085,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.113.136.085,00	147.000.000,00	2.260.136.085,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01.10	KECAMATAN MAESAAN	0,00	1.930.861.026,00	150.000.000,00	2.080.861.026,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.930.861.026,00	147.000.000,00	2.077.861.026,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.11	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	1.896.334.127,00	150.000.000,00	2.046.334.127,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.896.334.127,00	147.000.000,00	2.043.334.127,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.12	KECAMATAN MOTOLING	0,00	1.678.923.375,00	150.000.000,00	1.828.923.375,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.678.923.375,00	147.000.000,00	1.825.923.375,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.13	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	1.596.623.223,00	150.000.000,00	1.746.623.223,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.596.623.223,00	147.000.000,00	1.743.623.223,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.14	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	1.732.514.829,00	150.000.000,00	1.882.514.829,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.732.514.829,00	147.000.000,00	1.879.514.829,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.15	KECAMATAN TENGA	0,00	2.125.285.605,00	150.000.000,00	2.275.285.605,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.125.285.605,00	147.000.000,00	2.272.285.605,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.16	KECAMATAN AMURANG	0,00	4.190.444.057,00	5.798.339.623,00	9.988.783.680,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	4.190.444.057,00	5.798.339.623,00	9.988.783.680,00
4.01.17	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	2.786.702.990,00	2.101.962.264,00	4.888.665.254,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.786.702.990,00	2.098.962.264,00	4.885.665.254,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.18	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	2.108.937.734,00	2.139.698.113,00	4.248.635.847,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.108.937.734,00	2.136.698.113,00	4.245.635.847,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.19	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	1.431.967.805,00	150.000.000,00	1.581.967.805,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.431.967.805,00	147.000.000,00	1.578.967.805,00
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.01.20	KECAMATAN TATAPAAAN	0,00	1.711.260.450,00	150.000.000,00	1.861.260.450,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.711.260.450,00	147.000.000,00	1.858.260.450,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01.21	4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan KECAMATAN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00	1.985.401.750,00	150.000.000,00	2.135.401.750,00
	4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.985.401.750,00	147.000.000,00	2.132.401.750,00
	4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
	4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	4.491.493.229,00	4.629.282.200,00	9.120.775.429,00
	4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	4.491.493.229,00	4.629.282.200,00	9.120.775.429,00
4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	959.183.856.153,00	231.430.849.341,00	9.333.434.800,00	240.764.284.141,00
	4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	959.183.856.153,00	231.430.849.341,00	9.333.434.800,00	240.764.284.141,00
4.04.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	41.905.745.090,00	5.633.348.242,00	6.669.474.440,00	12.302.822.682,00
	4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	41.905.745.090,00	5.633.348.242,00	6.669.474.440,00	12.302.822.682,00
4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
	4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
JUMLAH		1.019.742.548.153,00	626.962.973.522,00	432.628.424.631,00	1.059.591.398.153,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.848.850.000,00)			

KODE	SATUAN KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH			1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN								
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO						
4.04.01				4.04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
									0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN									

Amurang, 28 December 2018
BUPATI MINAHASA SELATAN

 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	17.866.946.910,00	265.319.073.444,00	254.347.904.135,00	519.666.977.579,00
1.01	Pendidikan	0,00	208.894.980.994,00	65.756.195.190,00	274.651.176.184,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	208.894.980.994,00	65.724.945.190,00	274.619.926.184,00
1.01 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	208.894.980.994,00	47.568.345.190,00	256.463.326.184,00
1.01 . 1.01.01.02	SD INPRES AMURANG	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.01 . 1.01.01.03	SD INPRES KILOMETER TIGA	0,00	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00
1.01 . 1.01.01.04	SD INPRES RANOKETANG TUA	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00
1.01 . 1.01.01.05	SD NEGERI 1 AMURANG	0,00	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00
1.01 . 1.01.01.06	SD NEGERI 2 AMURANG	0,00	0,00	164.800.000,00	164.800.000,00
1.01 . 1.01.01.07	SD NEGERI 3 AMURANG	0,00	0,00	78.400.000,00	78.400.000,00
1.01 . 1.01.01.08	SD NEGERI 4 AMURANG	0,00	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00
1.01 . 1.01.01.09	SD NEGERI 5 AMURANG	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.10	SD INPRES KAPITU	0,00	0,00	85.600.000,00	85.600.000,00
1.01 . 1.01.01.11	SD INPRES KAWANGKOAN BAWAH	0,00	0,00	172.000.000,00	172.000.000,00
1.01 . 1.01.01.12	SD INPRES RUMOONG BAWAH	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.13	SD INPRES TEWASEN	0,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00
1.01 . 1.01.01.14	SD NEGERI RUMOONG BAWAH	0,00	0,00	80.800.000,00	80.800.000,00
1.01 . 1.01.01.15	SD NEGERI TEEP	0,00	0,00	130.400.000,00	130.400.000,00
1.01 . 1.01.01.16	SD NEGERI TEWASEN	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.17	SD NEGERI WAKAN	0,00	0,00	85.600.000,00	85.600.000,00
1.01 . 1.01.01.18	SDN TEEP TRANS	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00
1.01 . 1.01.01.19	SD INPRES KOTAMENARA	0,00	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00
1.01 . 1.01.01.20	SD INPRES LOPANA	0,00	0,00	113.600.000,00	113.600.000,00
1.01 . 1.01.01.21	SD INPRES MALIKU	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01 . 1.01.01.22	SD INPRES PINALING	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00
1.01 . 1.01.01.23	SD INPRES PONDANG	0,00	0,00	94.400.000,00	94.400.000,00
1.01 . 1.01.01.24	SD INPRES RANOMEA	0,00	0,00	104.800.000,00	104.800.000,00
1.01 . 1.01.01.25	SD INPRES RITEY	0,00	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00
1.01 . 1.01.01.26	SD INPRES KUMELEMBUAI	0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00
1.01 . 1.01.01.27	SD INPRES MAKASILI	0,00	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.28	SD INPRES MALOLA	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.29	SD NEGERI KUMELEMBUAI	0,00	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00
1.01 . 1.01.01.30	SD INPRES BOJONEGORO	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.01 . 1.01.01.31	SD INPRES LININGAAN	0,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00
1.01 . 1.01.01.32	SD INPRES LOWIAN	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01 . 1.01.01.33	SD INPRES TAMBELANG	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
1.01 . 1.01.01.34	SD NEGERI KINAWERUAN	0,00	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00
1.01 . 1.01.01.35	SD NEGERI LOWIAN	0,00	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00
1.01 . 1.01.01.36	SD INPRES KAKENTURAN	0,00	0,00	88.800.000,00	88.800.000,00
1.01 . 1.01.01.37	SD INPRES LINELEAN	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01 . 1.01.01.38	SD INPRES MAKAAROYEN	0,00	0,00	48.800.000,00	48.800.000,00
1.01 . 1.01.01.39	SD INPRES PALELON	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.01 . 1.01.01.40	SD INPRES PINASUNGKULAN	0,00	0,00	76.800.000,00	76.800.000,00
1.01 . 1.01.01.41	SD INPRES SINISIR	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
1.01 . 1.01.01.42	SD INPRES WULURMAATUS	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.43	SD NEGERI KAKENTURAN	0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00
1.01 . 1.01.01.44	SD NEGERI MOKOBANG	0,00	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00
1.01 . 1.01.01.45	SD INPRES 1 MOTOLING	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00
1.01 . 1.01.01.46	SD INPRES 2 MOTOLING	0,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00
1.01 . 1.01.01.47	SD INPRES PICUAN BARU	0,00	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00
1.01 . 1.01.01.48	SD NEGERI 1 MOTOLING	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.01 . 1.01.01.49	SD NEGERI 2 MOTOLING	0,00	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00
1.01 . 1.01.01.50	SD INPRES RAANAN BARU	0,00	0,00	49.600.000,00	49.600.000,00
1.01 . 1.01.01.51	SD INPRES TONDEI	0,00	0,00	87.200.000,00	87.200.000,00
1.01 . 1.01.01.52	SD NEGERI PELITA	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
1.01 . 1.01.01.53	SD NEGERI TOYOPON	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00
1.01 . 1.01.01.54	SD INPRES PICUAN	0,00	0,00	128.800.000,00	128.800.000,00
1.01 . 1.01.01.55	SD INPRES TOKIN	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00
1.01 . 1.01.01.56	SD INPRES WANGA	0,00	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
1.01 . 1.01.01.57	SD NEGERI KARIMBOW	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01.58	SD INPRES 1 PONTAK	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00
1.01 . 1.01.01.59	SD INPRES 2 PONTAK	0,00	0,00	56.800.000,00	56.800.000,00
1.01 . 1.01.01.60	SD INPRES LOMPAD	0,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00
1.01 . 1.01.01.61	SD INPRES MOPOLO	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.01 . 1.01.01.62	SD INPRES POPO	0,00	0,00	66.400.000,00	66.400.000,00
1.01 . 1.01.01.63	SD INPRES POWALUTAN	0,00	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00
1.01 . 1.01.01.64	SD NEGERI BERINGIN	0,00	0,00	93.600.000,00	93.600.000,00
1.01 . 1.01.01.65	SD NEGERI POWALUTAN	0,00	0,00	87.200.000,00	87.200.000,00
1.01 . 1.01.01.66	SD INPRES 1 ONGKAW	0,00	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.67	SD INPRES 2 ONGKAW	0,00	0,00	61.600.000,00	61.600.000,00
1.01 . 1.01.01.68	SD INPRES 3 ONGKAW	0,00	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00
1.01 . 1.01.01.69	SD INPRES BLONGKO	0,00	0,00	133.600.000,00	133.600.000,00
1.01 . 1.01.01.70	SD INPRES BOYONG PANTE	0,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00
1.01 . 1.01.01.71	SD INPRES DURIAN	0,00	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00
1.01 . 1.01.01.72	SD INPRES POIGAR	0,00	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00
1.01 . 1.01.01.73	SD INPRES TANAMON	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00
1.01 . 1.01.01.74	SD NEGERI POIGAR SATU	0,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00
1.01 . 1.01.01.75	SD NEGERI TANAMON	0,00	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00
1.01 . 1.01.01.76	SD NEGERI TINIAWANGKO	0,00	0,00	108.800.000,00	108.800.000,00
1.01 . 1.01.01.77	SD INPRES KAPOYA	0,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00
1.01 . 1.01.01.78	SD INPRES PINAPALANGKOW	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.01 . 1.01.01.79	SD INPRES SULUUN SATU	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
1.01 . 1.01.01.80	SD NEGERI TALAITAD	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00
1.01 . 1.01.01.81	SD INPRES 1 RUMOONG ATAS	0,00	0,00	59.200.000,00	59.200.000,00
1.01 . 1.01.01.82	SD INPRES 2 RUMOONG ATAS	0,00	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00
1.01 . 1.01.01.83	SD INPRES KANEYAN	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01 . 1.01.01.84	SD INPRES KORENG	0,00	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00
1.01 . 1.01.01.85	SD INPRES LANSOT	0,00	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
1.01 . 1.01.01.86	SD INPRES PINAMORONGAN	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.01 . 1.01.01.87	SD INPRES TUMALUNTUNG	0,00	0,00	80.800.000,00	80.800.000,00
1.01 . 1.01.01.88	SD INPRES WIAU LAPI	0,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00
1.01 . 1.01.01.89	SD INPRES WUWUK	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00
1.01 . 1.01.01.90	SD NEGERI WUWUK	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01.91	SD INPRES BAJO	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00
1.01 . 1.01.01.92	SD INPRES PASLATEN	0,00	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00
1.01 . 1.01.01.93	SD INPRES PUNGKOL	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00
1.01 . 1.01.01.94	SD INPRES RAP-RAP	0,00	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00
1.01 . 1.01.01.95	SD INPRES SONDAKEN	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1.01 . 1.01.01.96	SD NEGERI PASLATEN	0,00	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00
1.01 . 1.01.01.97	SD NEGERI POPARENG	0,00	0,00	104.800.000,00	104.800.000,00
1.01 . 1.01.01.98	SD NEGERI RAP-RAP	0,00	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00
1.01 . 1.01.01.99	SD NEGERI SULU	0,00	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00
1.01 . 1.01.01.00	SD NEGERI WAWONTULAP	0,00	0,00	59.200.000,00	59.200.000,00
1.01 . 1.01.01.01	SD INPRES 1 PAKUWERU	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1.01 . 1.01.01.02	SD INPRES 2 PAKUWERU	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.01 . 1.01.01.03	SD INPRES PAKUURE	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00
1.01 . 1.01.01.04	SD INPRES RADEY	0,00	0,00	71.200.000,00	71.200.000,00
1.01 . 1.01.01.05	SD INPRES SAPA	0,00	0,00	111.200.000,00	111.200.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.06	SD INPRES TAWAANG	0,00	0,00	118.400.000,00	118.400.000,00
1.01 . 1.01.01.07	SD INPRES TENGA	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00
1.01 . 1.01.01.08	SD NEGERI PAKUURE TIGA	0,00	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00
1.01 . 1.01.01.09	SD NEGERI SAPA	0,00	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00
1.01 . 1.01.01.10	SD INPRES KAROWA	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00
1.01 . 1.01.01.11	SD INPRES TOMPASO BARU DUA	0,00	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00
1.01 . 1.01.01.12	SD INPRES TOMPASO BARU SATU	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01.13	SD INPRES TOROUT	0,00	0,00	84.800.000,00	84.800.000,00
1.01 . 1.01.01.14	SD NEGERI RARAATEAN	0,00	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00
1.01 . 1.01.01.15	SD NEGERI TOMPASO BARU	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.01 . 1.01.01.16	SD INPRES LELEMA	0,00	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00
1.01 . 1.01.01.17	SD INPRES MATANI	0,00	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00
1.01 . 1.01.01.18	SD INPRES TANGKUNEI	0,00	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00
1.01 . 1.01.01.19	SD INPRES TUMPAAN	0,00	0,00	207.200.000,00	207.200.000,00
1.01 . 1.01.01.20	SD INPRES TUMPAAN DUA	0,00	0,00	71.200.000,00	71.200.000,00
1.01 . 1.01.01.21	SD NEGERI MATANI	0,00	0,00	164.800.000,00	164.800.000,00
1.01 . 1.01.01.22	SD NEGERI POPONTOLEN	0,00	0,00	124.800.000,00	124.800.000,00
1.01 . 1.01.01.23	SMP NEGERI 1 AMURANG	0,00	0,00	802.000.000,00	802.000.000,00
1.01 . 1.01.01.24	SMP NEGERI 2 AMURANG	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.01 . 1.01.01.25	SMPN 3 AMURANG (SATAP)	0,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00
1.01 . 1.01.01.26	SMP NEGERI 1 AMURANG BARAT	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
1.01 . 1.01.01.27	SMP NEGERI 2 AMURANG BARAT	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1.01 . 1.01.01.28	SMP NEGERI 3 AMURANG BARAT	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
1.01 . 1.01.01.29	SMP NEGERI 4 AMURANG BARAT	0,00	0,00	178.000.000,00	178.000.000,00
1.01 . 1.01.01.30	SMP NEGERI 1 AMURANG TIMUR	0,00	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00
1.01 . 1.01.01.31	SMP NEGERI 2 AMURANG TIMUR (SATAP)	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00
1.01 . 1.01.01.32	SMP NEGERI 3 AMURANG TIMUR (SATAP PINALING)	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01 . 1.01.01.33	SMP NEGERI 1 KUMELEMBUAI	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.01 . 1.01.01.34	SMP NEGERI 2 KUMELEMBUAI	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
1.01 . 1.01.01.35	SMP NEGERI 3 KUMELEMBUAI (SATU ATAP)	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01 . 1.01.01.36	SMP NEGERI 1 MAESAAAN	0,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00
1.01 . 1.01.01.37	SMP NEGERI 2 MAESAAAN	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.38	SMP NEGERI 3 MAESAAAN	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.39	SMP NEGERI 4 MAESAAAN	0,00	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00
1.01 . 1.01.01.40	SMP NEGERI 1 MODOINDING	0,00	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.01 . 1.01.01.41	SMP NEGERI 2 MODOINDING	0,00	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
1.01 . 1.01.01.42	SMP NEGERI 3 MODOINDING	0,00	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00
1.01 . 1.01.01.43	SMP NEGERI 4 MODOINDING	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01 . 1.01.01.44	SMP NEGERI 2 MOTOLING	0,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.45	SMP NEGERI 1 MOTOLING	0,00	0,00	182.000.000,00	182.000.000,00
1.01 . 1.01.01.46	SMP NEGERI 1 MOTOLING BARAT	0,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00
1.01 . 1.01.01.47	SMP NEGERI 2 MOTOLING BARAT (SATAP)	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00
1.01 . 1.01.01.48	SMP NEGERI 1 MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00
1.01 . 1.01.01.49	SMP NEGERI 2 MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00
1.01 . 1.01.01.50	SMP NEGERI 3 MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00
1.01 . 1.01.01.51	SMP NEGERI 1 RANOYAPO	0,00	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00
1.01 . 1.01.01.52	SMP NEGERI 2 RANOYAPO	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00
1.01 . 1.01.01.53	SMP NEGERI 3 RANOYAPO (SATAP)	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.54	SMP NEGERI 4 RANOYAPO	0,00	0,00	143.000.000,00	143.000.000,00
1.01 . 1.01.01.55	SMP NEGERI 5 RANOYAPO (SATAP)	0,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
1.01 . 1.01.01.56	SMP NEGERI 6 RANOYAPO	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00
1.01 . 1.01.01.57	SMP NEGERI 7 RANOYAPO	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
1.01 . 1.01.01.58	SMP NEGERI 1 SINONSAYANG	0,00	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00
1.01 . 1.01.01.59	SMP NEGERI 2 SINONSAYANG	0,00	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00
1.01 . 1.01.01.60	SMP NEGERI 3 SINONSAYANG	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00
1.01 . 1.01.01.61	SMP NEGERI 4 SINONSAYANG (SATAP)	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
1.01 . 1.01.01.62	SMP NEGERI 1 SULUUN TARERAN	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00
1.01 . 1.01.01.63	SMP NEGERI 2 SULUUN TARERAN	0,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00
1.01 . 1.01.01.64	SMP NEGERI 3 SULUUN TARERAN	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00
1.01 . 1.01.01.65	SMP NEGERI 4 SULUUN TARERAN (SATAP)	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
1.01 . 1.01.01.66	SMP NEGERI 1 TARERAN	0,00	0,00	217.000.000,00	217.000.000,00
1.01 . 1.01.01.67	SMP NEGERI 2 TARERAN	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.01 . 1.01.01.68	SMP NEGERI 3 TARERAN	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
1.01 . 1.01.01.69	SMP NEGERI 1 TATAPAAAN	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
1.01 . 1.01.01.70	SMP NEGERI 2 TATAPAAAN	0,00	0,00	177.000.000,00	177.000.000,00
1.01 . 1.01.01.71	SMP NEGERI 3 TATAPAAAN	0,00	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00
1.01 . 1.01.01.72	SMP NEGERI 4 TATAPAAAN (SATAP)	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
1.01 . 1.01.01.73	SMP NEGERI 1 TENGA	0,00	0,00	299.000.000,00	299.000.000,00
1.01 . 1.01.01.74	SMP NEGERI 2 TENGA	0,00	0,00	283.000.000,00	283.000.000,00
1.01 . 1.01.01.75	SMP NEGERI 3 TENGA	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
1.01 . 1.01.01.76	SMPN 4 TENGA (SATAP)	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
1.01 . 1.01.01.77	SMPN 5 TENGA (USB)	0,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00
1.01 . 1.01.01.78	SMP NEGERI 1 TOMPASO BARU	0,00	0,00	478.000.000,00	478.000.000,00
1.01 . 1.01.01.79	SMP NEGERI 2 TOMPASO BARU	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
1.01 . 1.01.01.80	SMPN 3 TOMPASO BARU (SATAP)	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.01 . 1.01.01.81	SMPN 4 SATAP TOMPASO BARU	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
1.01 . 1.01.01.82	SMP NEGERI 1 TUMPAAN	0,00	0,00	577.000.000,00	577.000.000,00
1.01 . 1.01.01.83	SMP NEGERI 2 TUMPAAN	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01.84	SMP NEGERI 3 TUMPAAN	0,00	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00
1.01 . 1.01.01.85	SMP NEGERI 4 TUMPAAN	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
1.01 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00
1.01 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	31.250.000,00	31.250.000,00
1.02	Kesehatan	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.154.234.745,00	132.606.165.111,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	17.266.124.245,00	41.451.930.366,00	91.150.234.745,00	132.602.165.111,00
1.02 . 1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	3.500.000.000,00	41.451.930.366,00	77.384.110.500,00	118.836.040.866,00
1.02 . 1.02.01.02	PUSKESMAS MODOINDING	523.172.087,00	0,00	523.172.087,00	523.172.087,00
1.02 . 1.02.01.03	PUSKESMAS MAESAN	1.125.109.920,00	0,00	1.125.109.920,00	1.125.109.920,00
1.02 . 1.02.01.04	PUSKESMAS TOMPASOBARU	936.336.690,00	0,00	936.336.690,00	936.336.690,00
1.02 . 1.02.01.05	PUSKESMAS POPO	662.474.393,00	0,00	662.474.393,00	662.474.393,00
1.02 . 1.02.01.06	PUSKESMAS MOTOLING	690.623.894,00	0,00	690.623.894,00	690.623.894,00
1.02 . 1.02.01.07	PUSKESMAS MOTOLING BARAT	627.090.182,00	0,00	627.090.182,00	627.090.182,00
1.02 . 1.02.01.08	PUSKESMAS MOTOLING TIMUR	361.255.026,00	0,00	361.255.026,00	361.255.026,00
1.02 . 1.02.01.09	PUSKESMAS KUMELEMBUI	397.035.487,00	0,00	397.035.487,00	397.035.487,00
1.02 . 1.02.01.10	PUSKESMAS ONGKAW	927.036.000,00	0,00	927.036.000,00	927.036.000,00
1.02 . 1.02.01.11	PUSKESMAS TENGA	1.266.066.806,00	0,00	1.266.066.806,00	1.266.066.806,00
1.02 . 1.02.01.12	PUSKESMAS AMURANG BARAT	594.000.000,00	0,00	594.000.000,00	594.000.000,00
1.02 . 1.02.01.13	PUSKESMAS AMURANG	1.148.400.000,00	0,00	1.148.400.000,00	1.148.400.000,00
1.02 . 1.02.01.14	PUSKESMAS AMURANG TIMUR	858.694.980,00	0,00	858.694.980,00	858.694.980,00
1.02 . 1.02.01.15	PUSKESMAS TUMPAAN	1.418.028.780,00	0,00	1.418.028.780,00	1.418.028.780,00
1.02 . 1.02.01.16	PUSKESMAS TATAPAN	990.000.000,00	0,00	990.000.000,00	990.000.000,00
1.02 . 1.02.01.17	PUSKESMAS TARERAN	712.800.000,00	0,00	712.800.000,00	712.800.000,00
1.02 . 1.02.01.18	PUSKESMAS SULUUN TARERAN	528.000.000,00	0,00	528.000.000,00	528.000.000,00
1.02 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02 . 4.01.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
1.03 . 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	550.822.665,00	4.466.620.894,00	69.817.196.200,00	74.283.817.094,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.04 . 1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.455.113.794,00	594.000.000,00	2.049.113.794,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	50.000.000,00	4.995.126.835,00	9.576.728.000,00	14.571.854.835,00
1.05 . 1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.126.256.859,00	5.100.000.000,00	7.226.256.859,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1.05.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.126.256.859,00	5.100.000.000,00	7.226.256.859,00
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50.000.000,00	2.868.869.976,00	4.303.678.000,00	7.172.547.976,00
1.05 . 1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50.000.000,00	2.868.869.976,00	4.303.678.000,00	7.172.547.976,00
1.05 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1.05 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	26.050.000,00	26.050.000,00
1.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
1.05 . 4.01.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
1.06	Sosial	0,00	4.055.300.561,00	17.449.550.000,00	21.504.850.561,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.056.647.398,00	2.600.700.000,00	4.657.347.398,00
1.06 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.056.647.398,00	2.600.700.000,00	4.657.347.398,00
1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.998.653.163,00	14.848.850.000,00	16.847.503.163,00
1.06 . 1.06.02.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.998.653.163,00	14.848.850.000,00	16.847.503.163,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	330.000.000,00	23.861.091.323,00	26.660.458.280,00	50.521.549.603,00
2.01	Tenaga Kerja	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
2.01 . 2.01.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	1.557.060.494,00	454.100.000,00	2.011.160.494,00
2.03	Pangan	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
2.03 . 2.03.01.01	DINAS PANGAN	0,00	1.799.311.574,00	265.350.000,00	2.064.661.574,00
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.05 . 2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.468.736.207,00	2.999.112.280,00	4.467.848.487,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.06 . 2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.480.655.699,00	2.284.961.000,00	4.765.616.699,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.07 . 2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0,00	2.080.265.604,00	2.503.880.000,00	4.584.145.604,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.08 . 2.08.01.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.591.123.915,00	5.740.915.000,00	8.332.038.915,00
2.09	Perhubungan	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.09 . 2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	130.000.000,00	5.370.898.963,00	644.000.000,00	6.014.898.963,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	1.542.429.177,00	8.368.000.000,00	9.910.429.177,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.542.429.177,00	8.288.000.000,00	9.830.429.177,00
2.10 . 2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.542.429.177,00	8.288.000.000,00	9.830.429.177,00
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.10 . 4.01.03.09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.455.370.735,00	754.390.000,00	2.209.760.735,00
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0,00	1.455.370.735,00	704.390.000,00	2.159.760.735,00
2.11 . 2.11.01.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	0,00	1.455.370.735,00	704.390.000,00	2.159.760.735,00
2.11 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11 . 3.02.01.01	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12	Penanaman Modal	0,00	1.781.220.527,00	1.229.500.000,00	3.010.720.527,00
2.12 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.12 . 1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.781.220.527,00	1.000.000.000,00	2.781.220.527,00
2.12 . 2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	1.781.220.527,00	1.000.000.000,00	2.781.220.527,00
2.12 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.12 . 4.01.03.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	947.500.000,00	947.500.000,00
2.13 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	945.000.000,00	945.000.000,00
2.13 . 1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	945.000.000,00	945.000.000,00
2.13 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.13 . 4.01.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.17	Perpustakaan	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00
2.17 . 2.17.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	1.734.018.428,00	333.740.000,00	2.067.758.428,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	2	3	4	5	6
				PENDAPATAN	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
		1	2	3	4	5	6
2.18	Kearsipan	2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	0,00	135.010.000,00	135.010.000,00
2.18 . 2.17.01				0,00	0,00	135.010.000,00	135.010.000,00
3	Urusan Pilihan	3.01		456.000.000,00	18.446.255.812,00	44.832.996.000,00	63.279.251.812,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.01 . 3.01.01				6.000.000,00	2.792.563.570,00	2.546.340.000,00	5.338.903.570,00
3.02	Parwisata	3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.633.233.000,00	13.056.860.002,00
3.02 . 3.02.01				10.000.000,00	2.423.627.002,00	10.633.233.000,00	13.056.860.002,00
3.03	Pertanian	3.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN	0,00	0,00	84.650.000,00	84.650.000,00
3.03 . 2.03.01				0,00	0,00	84.650.000,00	84.650.000,00
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	0,00	10.887.201.856,00	25.735.498.000,00	36.622.699.856,00
3.03 . 3.03.01				0,00	10.887.201.856,00	25.735.498.000,00	36.622.699.856,00
3.03 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	3.03 . 4.01.03	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.03 . 4.01.03				0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.06	Perdagangan	3.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.06 . 1.06.01				0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.06 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL	3.06 . 1.06.01.01	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.06 . 1.06.01.01				0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.06 . 3.06.01				440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.06 . 3.06.01.01	DINAS PERDAGANGAN	3.06 . 3.06.01.01	DINAS PERDAGANGAN	440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.06 . 3.06.01.01				440.000.000,00	2.342.863.384,00	5.751.275.000,00	8.094.138.384,00
3.08	Transmigrasi	3.08		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.08 . 2.01.01.01				0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penujangan	4.01	Administarsi Pemerintahan	1.001.089.601.243,00	319.336.552.943,00	106.787.066.216,00	426.123.619.159,00
4.01		4.01		1.001.089.601.243,00	319.336.552.943,00	106.787.066.216,00	426.123.619.159,00
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	14.828.709.279,00	14.828.709.279,00	14.828.709.279,00
4.01 . 4.01.01.01				0,00	14.828.709.279,00	14.828.709.279,00	14.828.709.279,00
Halaman 9							

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	563.582.414,00	0,00	563.582.414,00
4.01 . 4.01.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	563.582.414,00	0,00	563.582.414,00
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	14.453.883.184,00	45.407.173.365,00	59.861.056.549,00
4.01 . 4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	14.453.883.184,00	19.558.400.000,00	34.012.283.184,00
4.01 . 4.01.03.02	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	284.090.400,00	284.090.400,00
4.01 . 4.01.03.03	BAGIAN HUKUM	0,00	0,00	724.300.000,00	724.300.000,00
4.01 . 4.01.03.04	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	1.367.300.000,00	1.367.300.000,00
4.01 . 4.01.03.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	0,00	0,00	200.500.000,00	200.500.000,00
4.01 . 4.01.03.06	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	221.340.000,00	221.340.000,00
4.01 . 4.01.03.07	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00
4.01 . 4.01.03.08	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	0,00	0,00	17.586.300.000,00	17.586.300.000,00
4.01 . 4.01.03.09	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	0,00	0,00	2.920.000.000,00	2.920.000.000,00
4.01 . 4.01.03.10	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	0,00	0,00	479.442.965,00	479.442.965,00
4.01 . 4.01.03.11	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00
4.01 . 4.01.03.12	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	0,00	0,00	1.664.500.000,00	1.664.500.000,00
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	4.628.434.906,00	18.944.420.000,00	23.572.854.906,00
4.01 . 4.01.04.01	SEKRETARIAT DPRD	0,00	4.628.434.906,00	18.944.420.000,00	23.572.854.906,00
4.01 . 4.01.05	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	1.490.548.521,00	147.000.000,00	1.637.548.521,00
4.01 . 4.01.05.01	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	1.490.548.521,00	147.000.000,00	1.637.548.521,00
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	1.608.117.561,00	147.000.000,00	1.755.117.561,00
4.01 . 4.01.06.01	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	1.608.117.561,00	147.000.000,00	1.755.117.561,00
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	1.610.024.596,00	147.000.000,00	1.757.024.596,00
4.01 . 4.01.07.01	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	1.610.024.596,00	147.000.000,00	1.757.024.596,00
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN MODOINDING	0,00	1.648.431.875,00	177.000.000,00	1.825.431.875,00
4.01 . 4.01.08.01	KECAMATAN MODOINDING	0,00	1.648.431.875,00	177.000.000,00	1.825.431.875,00
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN TOMPASOBARU	0,00	2.113.136.085,00	147.000.000,00	2.260.136.085,00
4.01 . 4.01.09.01	KECAMATAN TOMPASOBARU	0,00	2.113.136.085,00	147.000.000,00	2.260.136.085,00
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN MAESAAN	0,00	1.930.861.026,00	147.000.000,00	2.077.861.026,00
4.01 . 4.01.10.01	KECAMATAN MAESAAN	0,00	1.930.861.026,00	147.000.000,00	2.077.861.026,00
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	1.896.334.127,00	147.000.000,00	2.043.334.127,00
4.01 . 4.01.11.01	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	1.896.334.127,00	147.000.000,00	2.043.334.127,00
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN MOTOLING	0,00	1.678.923.375,00	147.000.000,00	1.825.923.375,00
4.01 . 4.01.12.01	KECAMATAN MOTOLING	0,00	1.678.923.375,00	147.000.000,00	1.825.923.375,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	1.596.623.223,00	147.000.000,00	1.743.623.223,00
4.01 . 4.01.13.01	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	1.596.623.223,00	147.000.000,00	1.743.623.223,00
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	1.732.514.829,00	147.000.000,00	1.879.514.829,00
4.01 . 4.01.14.01	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	1.732.514.829,00	147.000.000,00	1.879.514.829,00
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN TENGA	0,00	2.125.285.605,00	147.000.000,00	2.272.285.605,00
4.01 . 4.01.15.01	KECAMATAN TENGA	0,00	2.125.285.605,00	147.000.000,00	2.272.285.605,00
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN AMURANG	0,00	4.190.444.057,00	5.798.339.623,00	9.988.783.680,00
4.01 . 4.01.16.01	KECAMATAN AMURANG	0,00	4.190.444.057,00	5.798.339.623,00	9.988.783.680,00
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	2.786.702.990,00	2.098.962.264,00	4.885.665.254,00
4.01 . 4.01.17.01	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	2.786.702.990,00	2.098.962.264,00	4.885.665.254,00
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	2.108.937.734,00	2.136.698.113,00	4.245.635.847,00
4.01 . 4.01.18.01	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	2.108.937.734,00	2.136.698.113,00	4.245.635.847,00
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	1.431.967.805,00	147.000.000,00	1.578.967.805,00
4.01 . 4.01.19.01	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	1.431.967.805,00	147.000.000,00	1.578.967.805,00
4.01 . 4.01.20	KECAMATAN TATAPAN	0,00	1.711.260.450,00	147.000.000,00	1.858.260.450,00
4.01 . 4.01.20.01	KECAMATAN TATAPAN	0,00	1.711.260.450,00	147.000.000,00	1.858.260.450,00
4.01 . 4.01.21	KECAMATAN TARERAN	0,00	1.985.401.750,00	147.000.000,00	2.132.401.750,00
4.01 . 4.01.21.01	KECAMATAN TARERAN	0,00	1.985.401.750,00	147.000.000,00	2.132.401.750,00
4.02	Pengawasan	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.02 . 4.02.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.033.243.706,00	4.547.670.276,00	10.580.913.982,00
4.03	Perencanaan	0,00	4.491.493.229,00	5.775.393.335,00	10.266.886.564,00
4.03 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.098.111.135,00	1.098.111.135,00
4.03 . 4.01.03.02	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	215.909.600,00	215.909.600,00
4.03 . 4.01.03.05	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
4.03 . 4.01.03.06	BAGIAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	751.100.000,00	751.100.000,00
4.03 . 4.01.03.07	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00
4.03 . 4.01.03.10	BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	0,00	0,00	16.601.535,00	16.601.535,00
4.03 . 4.01.05	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.05.01	KECAMATAN MOTOLING BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.06	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.06.01	KECAMATAN MOTOLING TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.07	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.07.01	KECAMATAN SULUUN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.08	KECAMATAN MODOINDING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.08.01	KECAMATAN MODOINDING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.09	KECAMATAN TOMPASO BARU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.09.01	KECAMATAN TOMPASO BARU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.10	KECAMATAN MAESAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.10.01	KECAMATAN MAESAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.11	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.11.01	KECAMATAN RANOYAPO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.12	KECAMATAN MOTOLING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.12.01	KECAMATAN MOTOLING	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.13	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.13.01	KECAMATAN KUMELEMBUAI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.14	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.14.01	KECAMATAN SINONSAYANG	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.15	KECAMATAN TENGA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.15.01	KECAMATAN TENGA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.17	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.17.01	KECAMATAN AMURANG BARAT	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.18	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.18.01	KECAMATAN AMURANG TIMUR	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.19	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.19.01	KECAMATAN TUMPAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.20	KECAMATAN TATA PAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.20.01	KECAMATAN TATA PAAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.21	KECAMATAN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.01.21.01	KECAMATAN TARERAN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	4.491.493.229,00	4.629.282.200,00	9.120.775.429,00
4.03 . 4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	4.491.493.229,00	4.629.282.200,00	9.120.775.429,00
4.04	Keuangan	1.001.089.601.243,00	237.064.197.583,00	16.002.909.240,00	253.067.106.823,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	959.183.856.153,00	231.430.849.341,00	9.333.434.800,00	240.764.284.141,00
4.04 . 4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	0,00	18.442.400.201,00	9.333.434.800,00	27.775.835.001,00
4.04 . 4.04.01.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (SKPKD)	959.183.856.153,00	212.988.449.140,00	0,00	212.988.449.140,00
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	41.905.745.090,00	5.633.348.242,00	6.669.474.440,00	12.302.822.682,00
4.04 . 4.04.02.01	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	41.905.745.090,00	5.633.348.242,00	6.669.474.440,00	12.302.822.682,00
4.05	Kepegawaian	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
4.05 . 4.05.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	0,00	3.627.493.033,00	3.987.500.000,00	7.614.993.033,00
JUMLAH		1.019.742.548.153,00	626.962.973.522,00	432.628.424.631,00	1.059.591.398.153,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.848.850.000,00)			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
4.04	Keuangan	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
4.04 . 4.04.01.02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET (SKPKD)	40.348.850.000,00	500.000.000,00	39.848.850.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Amurang, 28 December 2018
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU